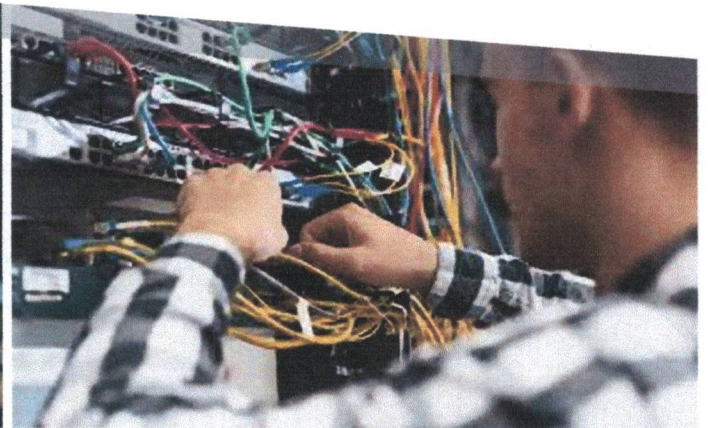




**KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**TAHUN
2025**



**RENCANA KERJA
(RENJA)**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Raya Tuapejat Km . 04 - Desa Tuapejat, Kec.Sipora Utara Kab. Kepulauan Mentawai
website : www.mentawaikab.go.id e-mail : kominfo@mentawaikab.go.id Telp. 0759 3211886

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 800.1.1.1/04.1/Tahun 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perlu dirumuskan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui proses evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, pembahasan diinternal Perangkat Daerah, pembahasan dengan melibatkan para pemangku kepentingan melalui Forum Perangkat Daerah serta verifikasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan informatika Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah KaBupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggungjawab, bertugas sebagai berikut :

- a. bertanggungjawab dan memberi keputusan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
- b. bertanggungjawab dalam setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
- c. bertanggungjawab serta memimpin penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.
- d. bertanggungjawab dalam penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- e. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual serta pemberian rekomendasi terhadap usulan prosposal hibah;
- f. melakukan validasi terhadap Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
- g. melakukan input indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, serta kelompok sasaran kegiatan pada setiap kegiatan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

2. Ketua, bertugas sebagai berikut :

- a. mengoordinir secara operasional dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.
- b. mengoordinir penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.
- c. mengoordinir penelaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- d. mengoordinir terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual serta pemberian rekomendasi terhadap usulan prosposal hibah;
- e. mengoordinir terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;

3. Sekretaris, bertugas sebagai berikut :

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
- b. mengatur teknis operasional dalam penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;

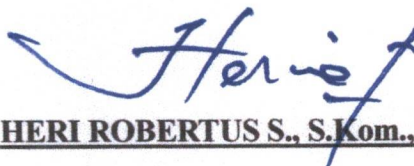
- d. menelaah dan menerapkan tahapan-tahapan perencanaan/pengendalian dan evaluasi serta konsep perencanaan dalam penyusunan dokumen sesuai peraturan yang berlaku;
 - e. melakukan sinkronisasi dan keselarasan penulisan serta substansi pada masing-masing Bab dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
 - f. mengoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat dalam mendukung kelancaran proses penyusunan dokumen perencanaan antara lain dalam bentuk administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, penyajian dokumen, publikasi dan distribusi serta penyebarluasan dokumen.
4. Koordinator Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :
- a. mengoordinir dan menyusun substansi penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
 - b. mengumpulkan dan menganalisa data dan informasi sesuai dengan kebutuhan dalam bentuk deskriptif, tabel, grafik, peta dan sebagainya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - c. menelaah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - d. mengoordinir penyiapan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
5. Anggota Kelompok Kerja, bertugas sebagai berikut :
- a. membantu Koordinator Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugas menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data, bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sub unit;
 - c. melakukan perumusan dan penyusunan substansi yang berkaitan erat dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
 - d. menyiapkan bahan serta terlibat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
6. Anggota Sekretariat, bertugas sebagai berikut :
- a. membantu menyediakan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mendukung proses penyusunan dokumen;
 - b. membantu mengoordinasikan dan mengkomunikasikan proses penyusunan dokumen dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen.
 - c. mengkompilasi serta memperbaiki format dan bentuk hasil tulisan (bukan substansi tulisan) dari masing-masing kelompok kerja kedalam format

- d. mengumpulkan, menyediakan, mengolah serta menganalisa data dan informasi serta evaluasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;
- e. membantu menyajikan hasil dokumen dalam bentuk paparan atau media lain dan mempublikasikan atau mendistribusikan dokumen dengan tujuan penyebaran dokumen.

- KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal, 30 Januari 2024

KEPALA DINAS,



HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom

NIP.197601132001121002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Mentawai sebagai laporan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 800.1.1.1/04.1/Tahun 2024
TANGGAL : 30 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
Kelompok Kerja Bidang Informatika		
4.	Kepala Bidang Informatika	Koordinator
5.	Kasi Layanan Infrastruktur Dasar Informatika pada Bidang Informatika	Anggota
6.	Kasi Layanan Manajemen dan Penyelenggaraan Informatika pada Bidang Informatika	Anggota
7.	Kasi Persandian	Anggota
Kelompok Kerja Bidang Komunikasi		
8.	Kepala Bidang Komunikasi	Koordinator
9.	Kasi Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi	Anggota
10.	Kasi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media Pada Bidang Komunikasi	Anggota
Sekretariat		
11.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Fungsional Umum di Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

KEPALA DINAS,



HERI ROBERTUS S., S.Kom., M.Kom

NIP.197601132001121002

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya lah, kami dapat membuat dan menyelesaikan bahan Rencana Kerja Tahun 2025 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Mentawai.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Penyusunan Renja OPD mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain RKPD Tahun 2025 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026, hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program kegiatan yang berasal dari masyarakat melalui penjangkauan aspirasi pada musrenbang.

Tersusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 disamping sebagai dokumen rencana kerja juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam arah perencanaan pembangunan dari yang berhubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan mengacu pada RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rencana Kerja ini diharapkan dapat memaksimalkan tugas dan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki 3 (tiga) urusan wajib yaitu komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Rencana kerja ini menggambarkan pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 dan merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam penyelenggaraan terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ahir kata kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja ini, sehingga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk kedepannya. Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Tuapejat, Pebruari 2024

KEPALA DINAS



HERI ROBERTUS.S.S.Kom.M.Kom
NIP. 19760113 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 LATAR BELAKANG.....	1
	1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
	1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	14
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	17
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN	
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	23
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	24
	3.3 Program dan Kegiatan.....	24
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	29
	4.1 Rencana Kerja Program,	
BAB V	PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2025 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Kerja Pemerintah Daerah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan *sinergi baik antar ruang, antar fungsi pemerintah antara pusat dan daerah*. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, secara makro perencanaan pembangunan di daerah disusun menurut hirarki yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan modifikasi makna dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan mentawai, Rencana Strategi (RENSTRA) dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai acuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dokumen ini merupakan suatu pedoman penyusunan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, tetapi dokumen ini juga mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam penentuan efisiensi optimalisasi pelaksanaan agenda program kegiatan.

Sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021, dokumen ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok-

pokok pencapaian dan pelaksanaan suatu kegiatan dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Agenda program kegiatan yang bersifat prioritas maupun non prioritas dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, perlu didukung oleh dokumen yang terorganisir dan terencana sesuai menurut Tugas Pokok dan Fungsi. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan secara teknis, dokumen ini sudah merupakan konsekuensi logis bagi perangkat daerah yang hendak memformulasikan berbagai ide dan masukan dari spektrum yang lebih luas.

Proses penyusunan Rencana Kerja OPD terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama yaitu, tahapan persiapan penyusunan, tahapan penyusunan rancangan dan tahapan penetapan rencana kerja opd. Penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen rencana kerja yang definitif. Setiap OPD harus menyusun rencana kerja sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan Renja OPD.

Rancangan Renja OPD dibahas pada form OPD, dimana pada pembahasan tersebut meliputi penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator, target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyesuaian program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas sesuai pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Salah satu pertimbangan dan indikator untuk memacu keberhasilan kinerja sesuai menurut standar pelayanan minimal dilingkup Organisasi Perangkat Daerah, adalah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hasil evaluasi dari program kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian, disamping dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi dokumen ini juga bermanfaat sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan dan kendala yang dianggap telah terlaksana maupun dihadapi.

Untuk terjaminnya pelaksanaan program kegiatan secara optimal, efektif, efisien dan terencana, maka setiap proses perencanaan perlu dilakukan berbagai tahapan yang salah satu diantaranya yakni regulasi yang baik dan memperoleh kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai menurut hukum normatif.

Dokumen ini disamping sebagai agenda dalam penyusunan perencanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi dokumen ini juga bertujuan sebagai kerangka dalam mewujudkan pelayanan publik kearah peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sebagai perangkat daerah yang dibentuk dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016, maka secara hukum administrasi kebijakan publik, dinas tersebut memiliki peran dan tanggungjawab untuk mensukseskan pembangunan daerah dan mengaktualisasikan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, tanggungjawab dan beban kerja yang semakin berat dalam pengambilan sebagian urusan pemerintah dibidang Komunikasi dan Informatika, maka Dinas Komunikasi dan Informatika perlu memperhatikan dan menetapkan berbagai langkah-langkah dalam upaya penyusunan perencanaan program kerja tahunan.

a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi

dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

c. Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika ;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan administrasi urusan komunikasi dan informatika ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025, disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2000;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- g. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran;
- h. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;
- i. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- j. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- k. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintahan provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten /kota;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2008 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Menyelaraskan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2025 dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- b. Sebagai langkah untuk konsistensi yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.
- c. Penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026.
- d. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- e. Sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mewujudkan dan menentukan pelaksanaan program prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Tujuan

- a. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.
- b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- c. Mewujudkan efisiensi alokasi anggaran dalam pembangunan daerah.
- d. Partisipasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam perencanaan dan pembangunan.

Disusunnya rencana kerja ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Komunikasi dalam penyusunan perencanaan dan menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan ; Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025.

BAB II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu : Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, Analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat,

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ; Berisikan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ; berisikan rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan.

BAB V. Penutup ; berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMINFO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kominfo

Proses penyusunan rencana kerja tidak terlepas dari hasil evaluasi yang dilakukan. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengetahui realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 yang memuat indicator keberhasilan suatu proses Pembangunan selama 4 (empat) tahun, yang dijadikan tolok ukur dalam menilai sejauh mana pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan akan menjadi pedoman menyusun rencana kerja (renja) di tahun berikutnya. Berikut ini hasil evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai tahun berjalan.

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Mentawai**

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023-2026	Realisasi target Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (renja perangkat daerah tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun 2024	
					Target renja perangkat daerah tahun 2023	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2023	Tingkat realisasi(%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			K	K	K	K	K			
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2 10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika									
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kepatuhan penyusunan perencanaan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah								
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan/pedoman perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran								

2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	6	6	6	100	6	18	75%
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan ASN	100	persen							
2	16	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	80	org	20	20	20	100	20	60	75
2	16	01	2.02	02	Penyediaan jasa administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya honor PA, PPTK, PPK dan pegawai kontrak	4	Dokumen	1	1	1	100	1	3	75
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100	persen							
2	16	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi/listrik penerangan kantor yg disediakan	4	Paket	1	1	1	100	1	3	75
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yg diadakan	16	Paket	5	5	5	100	5	15	93,75
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket cetakan dan penggadaan yg disediakan	16	Paket	4	4	4	100	4	12	75
2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8	dokumen	2	2	2	100	1	5	62,5
2	16	01	2.06	09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120	Laporan	30	30	30	100	35	95	79,17
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD	100	persen							
2	16	01	2.07	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	16	unit	0	0	0	0	2	6	37,50

2	16	01	2.08	02	Pengadaan peralatan mesin lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan	24	unit	6	6	6	6	100	13	25	104,17
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	100	persen								
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah lap.penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	3	3	3	4	100	4	10	83,33
2	16	01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum yang disediakan	4	laporan	1	1	1	1	100	1	7	175
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100	Persen								
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yg dipelihara	4	Unit	1	1	1	1	100	1	3	75
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	68	Unit	17	17	17	39	100	73		107,35
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	4	unit	1	1	1	1	100	1	3	75
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan Pemda	5	Persen								-
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya pengelolaan informasi	5	persen								

2	20	02	2.01	03	Membangun Metaddata Statistik Sektoral	Jumlah Metaddata Statistik Sektoral yang dihimppun	4	dok	0	0	0	0	0	1	1	25
---	----	----	------	----	--	--	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	----

Untuk rencana kerja tahun 2023 ada 3 (tiga) Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dari 3 (tiga) jumlah program tersebut terdapat 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Semua program dan kegiatan realisasi keuangan sudah memenuhi target yang telah, berikut ini hasil evaluasi kinerja Dinas Komunikasi Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai tahun berjalan sebagai berikut :

- a. Realisasi Program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /keluaran yang direncanakan.

Pada dasarnya program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang sudah direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Masih banyak yang harus dikerjakan untuk kedepan agar apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika berjalan dengan semestinya.

- b. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja Hasil /Keluaran Yang direncanakan.

Pada dasarnya program / kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun yang lalu sudah memenuhi target yang direncanakan, dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- Penyusunan dokumen perencanaan Rp. 25.062.000,- (98,28).

b. Administarsi Keuangan Perangkat Daerah.

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 1.960.351.335,- (95,31%).
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp. 26.400.000,- (95,65%).

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.13.060.000,- (100%).
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.106.835.295,- (97,12%).
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.64.510.000,- (99,25%).
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp.4.800.000,- (30,00%).

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.161.866.244,- (99,74%).

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel Rp. 33.853.000,- (96,81%).

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 105.825.925,- (89,00%).
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 593.075.148,- (90,07%).

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Rp.93.693.182,- (Rp.94,64%).
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp. 49.054.000,- (98,25%).
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp.79.054.000,- (98,83%).

II. Program Informasi dan Komunikasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Pelayanan Informasi Publik Rp.75.661.800,- (99,51%).
- Layanan hubungan media Rp. 267.868.400,- (99,93%).
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Rp.36.569.400,- (99,18%).
- Penyediaan / Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota Rp. 151.631.700,- (99,66%).

III. Program Aplikasi Informatika

Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Rp.2.814.557.200,- (98,57%).
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Rp.222.878.871,- (98,87%).
- c. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Untuk Program /Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 tidak ada yang melebihi target hasil /keluaran yang direncanakan.
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan.
- Tidak ada program dan kegiatan tahun yang lalu Dinas Komunikasi dan Informatika yang tidak mencapai target kinerja yang sudah ditentukan.
- e. Implikasi Yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah.
- Perubahan indikator kinerja dan target capaian program renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut.
- Melakukan Monitoring, evaluasi atas pekerjaan kegiatan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.
 - Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.
 - Mengambil kebijakan/Tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Persentase layanan elektronik terhadap Masyarakat			20	30	40	45	100	-	100	100		
	- Nilai Indeks SPBE			2	2,2	2,4	2,6	1,53	-	100	100		
2	Persentase layanan informasi oublik berbasis elektronik yang dimanfaatkan oleh masyarakat			70	75	80	85	100	-	100	100		
3	Persentase capaian kinerja perangkat daerah			100	100	100	100	100	-	100	100		
	- Nilai LAKIP			71,45	72,45	73,45	74,55	71,55	-	71,57	72,00		
	- Jumlah Inovasi			2	2	2	2	3	-	3	3		

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD.

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun lalu dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan bidang komunikasi dan informatika telah berlangsung cukup baik walaupun masih banyak yang harus dibenahi. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT keterbukaan informasi publik saat ini baik antar sektor lingkungan pemerintah, pemerintah dengan stakeholders maupun pemerintahan dengan masyarakat masih belum maksimal.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-government daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang semakin baik adalah salah satu tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh pihak, Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-government sebagai wujud pelayanan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kurang maksimalnya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu terwujudnya konektifitas wilayah dan akses informasi yang berkualitas dan merata.

Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki bidang komunikasi dan informatika kabupaten kepulauan mentawai dari sisi internal antara lain : perlunya ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran dan sarana prasarana, tersedianya tupoksi yang mendukung penyebaran informasi dan pengembangan TIK dan yang tidak kalah penting adalah anggaran yang mendukung. Dari sisi eksternal peluang yang harus dimiliki antara lain kepedulian pimpinan daerah terhadap bidang kominfo, kebutuhan peningkatan layanan jaringan komunikasi dan informatika yang berkualitas dan merata, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun isu-isu strategis antara lain :

1. Beberapa permasalahan yang menjadi isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah :

a. Kesekretariatan

- Kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi dalam pelaksanaan tugas pendukung administrasi seperti : akuntan, arsiparis dan bersertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Masih Kurangnya sarana dan prasarana dalam penunjang pelayanan administrasi.
- Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan dan tupoksi Dinas Komunikasi dan informatika sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017.

b. Bidang Komunikasi

- Masih kurangnya kualitas SDM bidang komunikasi.
- Kurangnya SDM dibidang komunikasi.
- Kurangnya sarana dan prasarana bidang komunikasi.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.
- Belum optimalnya pengembangan teknologi informasi komunikasi.

c. Bidang Informatika

- Belum adanya grand desgn pengembangan sistem informatika daerah yang mendukung penerapan SPBE.
- Belum tersedianya regulasi pengelolaan teknologi informasi.
- Masih terjadinya tumpang tindih pengelolaan teknologi informasi.
- Masih belum tersedianya sarana dan prasarana penduung pengembangan teknologi informasi.
- Belum tertatanya pengelolaan dan kewenangan penyelenggaraan teknologi informasi.
- Belum optimalnya penerapan teknologi informatika untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

- Belum tersedianya sumber daya manusia dalam pengembangan teknologi informatika.
- d. Bidang Statistik
- Belum definitifnya SOTK yang mengurus statistik daerah.
 - Belum optimalnya data statistik dalam menyusun evaluasi pembangunan daerah.
 - Belum optimalnya sistem satu data karena masih kurang SDM yang mengelola database dan belum tersosialisasi.
- e. Bidang Persandian.
- Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah.
 - Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah.
 - Belum adanya SDM persandian yang kompeten dalam memastikan keamanan sistem informasi pemerintah daerah.
2. Permasalahan dan kendala yang dialami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan tugas pokok fungsinya harus sedini mungkin diatasi agar mempercepat upaya apa yang menjadi target Dinas Komunikasi dan Informatika.
 3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (sustainable development goals);
 4. Sementara itu terdapat tantangan dan peluang bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain.

a. Tantangan

- Belum terpenuhinya infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pemerataan aksesibilitas telekomunikasi.
- Pelaksanaan diseminasi informasi belum berjalan optimal
- Masih adanya pembuatan aplikasi sistem informasi pada dinas / perangkat daerah lain sehingga pengembangan informasi tidak dapat dibangun secara kompatible.
- Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah dan sederhana.
- Belum kuatnya jejaring informasi antar organisasi perangkat daerah pemda kabupaten kepulauan mentawai.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah kabupaten kepulauan mentawai melalui pemanfaatan persandiaan dan peningkatan kualitas keamanan informasi.
- Peningkatan kapasitas SDM.

b. Peluang

- Semakin tingginya pemanfaatan perangkat komunikasi oleh masyarakat.
- Tingginya tuntutan dari penerapan aplikasi pada sistem daerah sehingga kondisi pengerjaan manual harus beralih ke sistem informasi teknologi.
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayan publik Kabupaten Kepulauan Mentawai berbasis elektronik.
- Kesadaran masyarakat mentawai akan pentingnya informasi dan komunikasi.
- Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan kabupaten kepulauan mentawai.

5. Rekomendasi yang diberikan sebagai catatan strategis dalam meminimalisir permasalahan tersebut adalah :

- Peningkatan kualitas SDM manusia yang mengerti dan ahli dibidang TIK.
- Peningkatan sarana dan prasaran yang berhubungan di informasi dan informatika.
- Peningkatan kualitas layanan telekomunikasi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat mentawai sampai ke pelosok daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai bekerjasama dengan telkom dan BAKTI.
- Membentuk regulasi yang mengatur tentang sumber daya TIK daerah.
- Peningkatan efektifitas koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja (RKPD) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kerangka awal dalam menghimpun dan Menyusun semua rencana kebutuhan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuai, cocok atau tidak cocok besarnya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Berikut ini akan diuraikan review terhadap rancangan awal Rencana Kerja (Renja) RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 berdasarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Mentawai

NO	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				4.254.448.293	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika				4.254.448.293	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan penyusunan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 persen	4.254.448.293	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kepatuhan penyusunan dan pelaporan pelayanan tugas perangkat daerah	100 persen	4.254.448.293	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Acuan/pedoman perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran	100 persen	30.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Acuan/pedoman perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran	100 persen	30.000.000	
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kominfo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	30.000.000	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya kesejahteraan ASN	100 persen	2.421.424.315	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya kesejahteraan ASN	100 persen	2.421.424.315	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kominfo	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20 org	2.349.324.315	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kominfo	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	22 Org	2.349.324.315	
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kominfo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dok	72.100.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kominfo	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 dok	72.100.000	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	329.975.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	329.975.200	

2.16.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kominfo	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	20.000.000	20.000.000	1 paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20.000.000
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kominfo	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diadakan	5 paket	99.997.200	99.997.200	5 paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diadakan	99.997.200
2.16.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kominfo	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	50.000.000	50.000.000	2 paket	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50.000.000
2.16.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kominfo	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	9.990.000	9.990.000	1 dok	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9.990.000
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 Lap	149.988.000	149.988.000	30 Lap	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	149.988.000
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya kesadaran perangkat daerah pentingnya administrasi BMD	100 persen	463.678.428	463.678.428	100 persen	Meningkatnya kesadaran perangkat daerah pentingnya administrasi BMD	463.678.428
2.16.01.2.07.05	Pengadaan kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit kendaraan roda 4	363.680.000	363.680.000	1 unit kendaraan roda 4	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	363.680.000
2.16.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 unit	99.998.428	99.998.428	4 unit	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	99.998.428
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	100 persen	723.072.000	723.072.000	100 persen	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	723.072.000
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 lap	120.000.000	120.000.000	4 lap	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	120.000.000
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kominfo	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	5 lap	603.072.000	603.072.000	5 lap	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yg disediakan	603.072.000
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya kinerja pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100 persen	286.298.350	286.298.350	100 persen	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	286.298.350

2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kominfo	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	86.308.350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kominfo	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	86.308.350	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	49.990.000	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Kominfo	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit	49.990.000	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kominfo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	150.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kominfo	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	150.000.000	
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Kominfo	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	7 persen	1.347.282.470	Program Informasi dan Komunikasi Publik	5 persen	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	7 persen	1.347.282.470	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	7 persen	1.347.282.470	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	7 persen	1.347.282.470	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan informasi publik	Kab. Kep mentawai	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 dok	277.283.000	Pelayanan informasi publik	Kab. Kep mentawai	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 dok	277.283.000	
2.16.02.2.01.07	Monitoring informasi kebijakan,opini dan aspirasi publik	Tuapejat	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas penda	1 dok	149.999.860	Monitoring informasi kebijakan,opini dan aspirasi publik	Tuapejat	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas penda	1 dok	149.999.860	
2.16.02.2.01.12	Desiminasi Informasi	Tuapejat	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	1 dok	169.999.800	Desiminasi Informasi	Tuapejat	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	1 dok	169.999.800	
2.16.02.2.01.13	Pengelolaan media komunikasi publik	Kab. Kep Mentawai	Jumlah media komunikasi public milik penda yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis	1 dok	349.999.910	Pengelolaan media komunikasi publik	Kab. Kep Mentawai	Jumlah media komunikasi public milik penda yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis	1 dok	349.999.910	

2.16.02.2.01.14	Penyusunan strategi komunikasi publik	Kab. Kep Mentawai	Jumlah strategi komunikasi public yang disusun	1 dok	399.999.900	399.999.900	Jumlah strategi komunikasi public yang disusun	1 dok	399.999.900
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	70 persen	3.282.378.340	3.282.378.340	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	70 persen	3.282.378.340
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	20 persen					
2.16.03.2.01	Peningkatnya pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah		Meningkatnya pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah	10 domain	2.779.995.000	2.779.995.000	Meningkatnya pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah	10 domain	2.779.995.000
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kab. Kep Mentawai	Jumlah unit sistem jaringan intra pemerintah daerah	31 unit	2.779.995.000	2.779.995.000	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	31 unit	2.779.995.000
2.16.03.2.02	Pengelolaan E government dilingkungan Pemerintah daerah kabupaten /kota		Meningkatnya nilai spbe	2,1 indeks	249.998.600	249.998.600	Meningkatnya nilai spbe	2,1 indeks	249.998.600
2.16.03.2.02.02	Koordinasi pengelolaan data dan informasi	Kab. Kep Mentawai	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dok	239.999.600	239.999.600	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dok	239.999.600
2.16.03.2.10	Pembangunan dan / atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pmda	Kab. Kep Mentawai	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pmda	1 aplikasi	9.999.000	9.999.000	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pmda	1 aplikasi	9.999.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase keterisian data pembangunan perangkat daerah	90 persen	49.999.800	49.999.800	Persentase keterisian data pembangunan perangkat daerah	90 persen	49.999.800
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/kota		Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral untuk pengambilan kebijakan	90 persen	49.999.800	49.999.800	Meningkatnya penggunaan data statistik sektoral untuk pengambilan kebijakan	90 persen	49.999.800

2.20.02.2.01.01	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Kab. Kep Mentawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	12 org	10.000.000	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Kab. Kep Mentawai	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	12 org	10.000.000
2.21.02.2.02	Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional	Kab. Kep Mentawai	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan atau penyusunan kebijakan	10 opd	10.000.000	Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional	Kab. Kep Mentawai	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan atau penyusunan kebijakan	10 opd	10.000.000
2.21.02.2.02.01	Peningkatan kualitas data statistik data sektoral	Kab. Kep Mentawai	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu	20 persen	10.000.000	Peningkatan kualitas data statistik data sektoral	Kab. Kep Mentawai	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu	20 persen	10.000.000
2.21.02.2.02.02	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Kab. Kep Mentawai	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 kegiatan	9.999.800	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Kab. Kep Mentawai	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 kegiatan	9.999.800
2.21.02.2.02.02	Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Kab. Kep Mentawai	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik	1 dok	10.000.000	Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Kab. Kep Mentawai	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik	1 dok	10.000.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Komunikasi dan Informatika banyak mendapatkan usulan dari masyarakat maupun dari pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai berupa tower untuk komunikasi. Akan tetapi karena anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat akan jaringan komunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas tidak bisa terpenuhi. Akan tetapi Dinas Komunikasi dan informatika dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat akan jaringan komunikasi yang memadai dibantu oleh BAKTI dalam pembangunan tower BTS berdasarkan usulan dari masyarakat yang sampai saat ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika selalu berupaya untuk lebih memaksimalkan semua program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan akan tetapi semua tergantung pada semua pihak terutama pemerintah daerah, agar kedepannya apa yang sama-sama diharapkan tercapai terutama untuk kemajuan komunikasi dan informatika di daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk usulan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai disesuaikan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan permasalahan yang ada pada renstra, visi misi Kabupaten Kepulauan Mentawai, RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai serta pencapaian program nasional yang terkandung dalam standar pelayanan minimal.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam perencanaan program dan kegiatannya masih fleksibel artinya masih dapat menerima/menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok Masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi dan lain-lain.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat ke daerah.

Bidang komunikasi dan informatika sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan di bidang komunikasi dan informatika akan sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu pembangunan infrastruktur dan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal. Sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan jangka menengah RPD 2023-2026 Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka mendukung Pembangunan tertuang dalam sasaran strategis rencana Pembangunan daerah (RPD) 2023-2026 antara lain :

1. Meningkatnya pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan.
2. Meningkatnya akses mutu layanan Kesehatan.
3. Meningkatnya keterampilan hidup (life skill) sumber daya.
4. Meningkatnya infrastruktur jalan yang berkualitas.
5. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya air.
6. Meningkatnya pemanfaatan penataan ruang wilayah.
7. Meningkatnya penyelenggaraan transportasi.
8. Meningkatnya kualitas layanan jaringan telekomunikasi dan informatika.

9. Meningkatnya ratio elektrifikasi daerah.
10. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni.
11. Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
12. Meningkatnya integrasi pencegahan dan penanggulangan bencana.
13. Meningkatnya pendapatan Masyarakat.
14. Meningkatnya kesempatan kerja.
15. Terkendalinya inflasi daerah.
16. Meningkatnya kualitas pelayanan public.
17. Meningkatnya kapabilitas pemerintahan.
18. Meningkatnya kualitas tat Kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
19. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai luhur budaya.
20. Meningkatnya budaya literasi.
21. Meningkatnya kehidupan Masyarakat yang ramah anak dan gender.

Selaras dengan agenda Pembangunan nasional, arah kebijakan Pembangunan propinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 juga memperhatikan arah dan prioritas Pembangunan nasional yang mengutamakan Pembangunan infrastruktur (konektifitas), kedaulatan pangan dan kemaritiman. Prioritas Pembangunan dalam perencanaan pembangunan di *Propinsi Sumatera Barat* antara lain :

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah adat basandi syara' – syara' basandi kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, Perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan.
6. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah, merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan fungsi :

1. Perumusan kebijakan daerah urusan komunikasi dan informatika.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika.
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan komunikasi dan informatika.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan perangkat daerah.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah ***Meningkatnya Sistem Komunikasi dan Informatika Serta SPBE.***

b. Sasaran

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam 1 (satu) tahun pada masa sekarang. Berdasarkan pengertian tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan tujuan dan sasaran rencana kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan RPD

Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke-				
				2023	2024	2025	2026	Kondisi akhir
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan layanan informasi komunikasi publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	1. Persentase layanan elektronik terhadap masyarakat	20	30	40	45	45
			2. Nilai Indeks SPBE	2	2,2	2,4	2,6	2,6
		Meningkatnya cakupan layanan informasi dan komunikasi publik	Persentase layanan informasi publik berbasis elektronik yang dimanfaatkan oleh masyarakat	70	75	80	85	85
		Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai lakip 2. Jumlah Inovasi 3. Persentase capaian kinerja perangkat daerah	71,45 2 100	72,45 2 100	73,45 2 100	74,55 2 100	74,55 2 100

3.3 Program dan Kegiatan

Dengan berubahnya Pemendagri Nomor 90 Tahun 2021 ke Peraturan Permendagri Nomor 050 Tahun 2021 struktur organisasi bidang komunikasi dan informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu Non Urusan, urusan komunikasi dan informatika, statistik sektoral serta urusan persandian . Adapun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2025 adalah tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan dan Prakiran Maju Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan prakiraan maju tahun 2026
Kabupaten Kepulauan Mentawai

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
(1)			(2)	(3)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					(4)	(5)	(6)	(7)		(9)	(10)
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	16		Komunikasi dan Informatika								
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kepatuhan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pelayanan Tugas Perangkat Daerah	Kominfo	100 persen	4.254.388.293			100 persen	4.672.180.000
2	16	01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Acuan/pedoman perangkat daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran		100 persen	30.000.000			100 persen	50.000.000
2	16	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Kominfo	6 dokumen	30.000.000	DAU		6 dokumen	50.000.000
2	16	01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan ASN		100 persen	2.421.424.315			100 persen	2.637.000.000
2	16	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kominfo	21 orang	2.349.324.315	D A U		21 orang	2.600.000.000
2	16	01	Penyediaan jasa administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kominfo	2 dok	72.100.000	D A U		2 dok	37.000.000
2	16	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100 persen	329.975.200			100 persen	463.000.000
2	16	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kominfo	3 paket	20.000.000	D A U		3 paket	30.000.000

2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang diadakan	Kominfo	4 paket	99.997.200	DAU		4 paket	100.000.000
2	16	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kominfo	2 paket	50.000.000	D A U		4 paket	70.000.000
2	16	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kominfo	1 dok	9.990.000	D A U		1 dok	13.000.000
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Luar Daerah	30 laporan	149.988.000	D A U		30 laporan	250.000.000
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan OPD		100 persen	463.678.428			100 persen	465.680.000
2	16	01	2.07	05	Pengadaan kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yg disediakan	Kab.Kep. Mentawai	1 unit	363.680.000	D A U		1 unit	365.680.000.
2	16	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kab.Kep. Mentawai	4 unit	99.998.428	DAU		2 paket	100.000.000
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah		100 persen	723.072.000				770.000.000
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air, listrik dan internet	kominfo	4 laporan	120.000.000	D A U		3 laporan	120.000.000
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	kominfo	5 laporan	603.072.000	D A U		5 laporan	650.000.000
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tupoksi perangkat daerah		100 persen	286.238.350			100 persen	286.500.000
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pejaknya	Kab.Kep. Mentawai	1 unit	86.308.350	DAU		1 unit	86.500.000
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Kab.Kep. Mentawai	5 unit	49.930.000	DAU		8 paket	50.000.000

2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kab. Kep. Mentawai	1 gedung	150.000.000	DAU		1 gedung	150.000.000
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		5 persen	1.347.282.470			5 persen	1.350.000.000
2	16	02	2.01	06	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota		5 persen	1.347.282.470			5 persen	1.350.000.000
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Kab. Kep mentawai	1 dokumen	277.283.000	D A U		1 dokumen	280.000.000
2	16	02	2.01	07	Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas pemda	Kab. Kep mentawai	1 dok	149.999.860	D A U		1 dok	150.000.000
2	16	02	2.01	12	Desiminasi informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Kab. Kep mentawai	1 dok	169.999.800	D A U		1 dok	170.000.000
2	16	02	2.01	13	Pengelolaan media komunikasi public	Jumlah media komunikasi public milik pemda yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis	Kab. Kep mentawai	1 dok	349.999.910	DAU		1 dok	350.000.000
2	16	02	2.01	15	Penyusunan strategi komunikasi publik	Jumlah strategi komunikasi public yang disusun	Kab. Kep mentawai	1 dok	399.999.900	DAU		1 dok	400.000.000
2	16	03			Program Aplikasi informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan layanan akses internet yang disediakan dinas kominf		80 persen	3.029.993.600				3.130.000.000
						Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		20 persen					

2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya pemanfaatan nama dan sub domain dilingkungan pemerintah daerah	10 domain	2.779.995.000	DAU		10	2.790.000.000
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	31 unit	2.779.995.000	DAU		31 unit	2.790.000.000
2	16	03	2.02		Pengelolaan E government dilingkungan Pemerintah daerah kabupaten / kota	Meningkatnya ilai SPBE	2,1 indeks	249.998.600	DAU		2,1	340.000.000
2	16	03	2.02	02	Koordinasi pengelolaan data dan informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 dok	239.999.600	DAU		Unit	240.000.000
2	16	03	2.02	10	Pembangunan dan / atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemda	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemda	1 aplikasi	9.999.000	D A U		Dokumen	100.000.000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase keterisian data pembangunan perangkat daerah	90 persen	49.999.800			90 persen	750.000.000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral	10 OPD	49.999.800			10 OPD	750.000.000
2	20	02	2.01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	12 org	10.000.000	D A U		12 org	150.000.000
2	21	02			Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan atau penyusunan kebijakan	10 opd	10.000.000	D A U		10 opd	150.000.000
2	21	02	01		Peningkatan kualitas data statistik data sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu	20 persen	10.000.000	D A U		20 persen	150.000.000

2	21	02	01	03	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kab. Kep. Mentawai	1 kegiatan	9.999.800	DAU		1 kegiatan	150.000.000
2	21	02	01	04	Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina data statistik	Kab. Kep. Mentawai	1 dok	10.000.000	DAU		1 dok	150.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran informasi baik melalui media elektronik, media massa dan media online Dinas Komunikasi dan Informatika sangat diharapkan perannya dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Adapun Rencana kerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Permendagri Nomor 50 tahun 2021 maka ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan serta fokus prioritas rencana kerja sesuai dengan RKPD tahun 2025 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026.
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program, kegiatan dan sub kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
I	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan gaji dan tunjangan
	2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	2	Penyediaan Bahan Logistik
	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

	5	Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1	Pengadaan kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
	2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
	2	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
I	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	
	1	Pelayanan Informasi Publik
	2	Pelayanan informasi publik
	3	Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi public
	4	Desiminasi informasi
	5	Pengelolaan media komunikasi public
	6	Penyusunan strategi komunikasi public
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		
I	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
	1	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah
II	Pengelolaan E government dilingkungan Pemerintah daerah kabupaten /kota	
	1	Koordinasi pengelolaan data dan informasi
	2	Pembangunan dan / atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pmda
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
		Peningkatan peran statistik sektoral terhadap sistem statistik nasional
		Peningkatan kualitas data statistik data sektoral
		Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia
		Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar

BAB V

PENUTUP

Puji syukur kami ucapkan akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2023-2026 dapat diselesaikan walau masih banyak yang harus disempurnakan lagi. Dalam lingkup internal Rencana Kerja (renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 berfungsi sebagai acuan bahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 .

Melihat hal tersebut di atas maka pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai utamanya bidang komunikasi dan informatika perlu mendapatkan perhatian serius mengingat saat ini perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Segala aspek kehidupan masyarakat sudah banyak menggunakan teknologi informasi dan informatika. Demikian pula penerapannya dalam pemerintahan guna mewujudkan E-goverment. Melalui E-goverment ini pula diharapkan bahwa pelayanan publik dapat lebih maksimal, efektif dan efisien.

Dalam perkembangannya tentu ada berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi antara lain bahwa saat ini konsep smart city belum terwujud di Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa sumber daya aparatur di bidang komunikasi dan informatika sangat terbatas dan belum memadai, perkembangan teknologi informasi begitu pesat dan kemampuan daerah untuk mengikutinya belum maksimal.

Selanjutnya diharapkan bahwa kehadiran Dinas Komunikasi dan Informatika mampu menjembatani sehingga perkembangan teknologi informasi dapat berdaya guna

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperlancar kinerja aparatur sipil negara sehingga lebih efektif dan efisien.

Tuapejat, Pebruari 2024

KEPALA DINAS



HERI ROBERTUS.S,S.Kom.M.Kom
NIP.19760113 200112 1 002

USULAN DANA ASPRASI MASYARAKAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN	STATUS	REKOMENDASI MITRA
1	1147147	24-01-2024	Balsanus	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pengadaan Tower BTS di Dusun sagitsi 1 Unit	Desa Nemnemeleu, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Sipora Selatan	Nemnemeleu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Usulan diterima
2	1407870	12-02-2024	Yohanes Tasirikeru	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Wifi untuk UNBK sekolah SMPN2 siberut selatan tidak ada	Dusun malabaet desa madobag, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Selatan	Madobag	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Usulan diterima dan dipertimbangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
3	1408466	12-02-2024	Yohanes Tasirikeru	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Jaringan tower di dusun ugi belum ada sehingga informasi sangat sulit	Dusun ugi desa madobag, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Selatan	Madobag	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	diterima dan direkomendasikan
4	1417202	13-02-2024	Wisman	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	kuualitas sinyal internet yang ada di Matobe sangat lambat sehingga beberapa tugas pemerintahan terkait aplikasi menjadi terhambat	Dusun Sooroat Desa Matobe, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Sipora Selatan	Matobe	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	diterima dan direkomendasikan
5	1436044	16-02-2024	Ali Uman	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Kapasitas Tower Mini yang ada sekarang tidak memadai sehingga butuh tower Besar	Desa Matotonan, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Selatan	Matotonan	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	diterima dan direkomendasikan
6	1442846	18-02-2024	Aprion, S. HI	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Belum Adanya jaringan Tower BTS untuk Komunikasi Masyarakat Di Dusun Pura Desa Muara Sikabalu.	Dusun Pura Desa Muara Sikabalu, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Utara	Muara Sikabalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Diterima dan direkomendasikan
7	1444490	18-02-2024	Aprion, S. HI	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Permohonan Pengadaan Jaringan Wifi SDN 09 Muara Sikabalu yang merupakan Kebutuhan Utama saat ini dengan Metode Penilaian Pendidikan berbasis ANBK	Dusun Muara, Desa Muara Sikabalu, Kecamatan Siberut Utara, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Utara	Muara Sikabalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Rekomendasi
8	1444543	18-02-2024	Aprion, S. HI	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Permohonan Pengadaan jaringan Wifi untuk KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Siberut Utara, Guna Kelancaran Koordinasi dan Pemutakhiran Data Perodik Sekolah di wilayah Kerja Kecamatan Siberut Utara	Dusun Nang-nang Desa Muara Sikabalu, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Utara	Muara Sikabalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Tidak rekomendasi
9	1453039	19-02-2024	Jalimin	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan Tower Mini	Dusun Sirilnggai, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Utara	Malancan	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Rekomendasi
10	1453075	19-02-2024	Jalimin	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pengadaan Tower Mini untuk Dusun Terekan Hulu	Dusun Terekan Hulu, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Utara	Malancan	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Rekomendasi
11	1454065	19-02-2024	Aprion, S. HI	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Permohonan Peningkatan Daya Wifi Puskesmas Muara Sikabalu	Dusun Nang-nang, Desa Muara Sikabalu, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Utara	Muara Sikabalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Tidak rekomendasi
12	1495763	24-02-2024	Jalimin Siriri	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Perlu ada pengadaan wifi di SD N 03 Sotboyak karena sangat penting bagi guru-guru maupun siswa mengakses internet untuk kebutuhan proses belajar mengajar melihat kondisi Desa Sotboyak juga masih sangat Minim kelancaran jaringan 4G	Desa Sotboyak, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Utara	Sotboyak	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Tidak rekomendasi, pengadaan harus di lakukan dengan dinas pendidikan
13	1495961	24-02-2024	Herlin Roiko, S. I. Kom	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat Desa Sirilogi adalah Jaringan internet maka diusulkan supaya dibangun Tower besar untuk meningkatkan kecepatan internet di Desa Sirilogi	Desa Sirilogi, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Utara	Sirilogi	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Rekomendasi

14	1516144	27-02-2024	Demas Sakrebau	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Kapasitas Tower BTS di Hutan Silabu tidak dapat dipakai akibat kapasitas pemakaian yang sudah berlebih	Hutan Silabu, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	Silabu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Tidak rekomendasi
15	1516164	27-02-2024	Demas Sakrebau	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Belum Tersedianya akses layanan informasi di Silabu	Silabu Bawah, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	Silabu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Rekomendasi
16	1516172	27-02-2024	Demas Sakrebau	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Belum tersedianya akses layanan informasi	Tumalei, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	Silabu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Rekomendasi
17	1531341	29-02-2024	Gedalias	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Penggunaan jaringan yang masih terbatas	desa berulou, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Sipora Selatan	Berulou	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Rekomendasi
18	1533347	29-02-2024	Karlo Saumanuk	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Belum ada tower BTS	Dusun Tiop/Dusun Sarasau, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	Katurei	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Rekomendasi
19	1533404	29-02-2024	Karlo Saumanuk	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pengadaan Wifi Gedung Sekolah	Maillimok/Tiop/Sarasau/Toloulagro, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	Katurei	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Tidak rekomendasi
20	1533483	29-02-2024	Karlo Saumanuk	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pengadaan Wifi Gedung Pustu	Dusun Maillimok/Tiop/Sarasau/Toloulagro, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	Katurei	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Tidak rekomendasi
21	1562725	05-03-2024	Trijilius T. Onan	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	kondisi wifi Kantor Desa belum Maksimal	Kantor Desa Saureinu, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Sipora Selatan	Saureinu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Rekomendasi
22	1572738	06-03-2024	Sudirman Sababalat, S.Pd	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan jaringan komunikasi, tower mini	Sabiret, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Selatan	Malakopa	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Rekomendasi
23	1572740	06-03-2024	Sudirman Sababalat, S.Pd	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan jaringan komunikasi, tower mini	Muntei, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Selatan	Malakopa	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Rekomendasi
24	1572744	06-03-2024	Sudirman Sababalat, S.Pd	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan jaringan komunikasi, tower mini	Eruparabot Sibau, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Selatan	Malakopa	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Rekomendasi
25	1594366	13-03-2024	Johari	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Tower Besar Telkomsel (4G)	Tailelu, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	Pasakiat Tailelu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Usulan diterima
26	1594367	13-03-2024	Johari	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Tower Besar Telkomsel (4G)	Dusun Bolotok, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	Pasakiat Tailelu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Usulan diterima
27	1595391	13-03-2024	Magdarius	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	masyarakat susah dalam berkomunikasi	Guluk guluk ruba, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	Saumanganya	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Usulan diterima
28	1595626	13-03-2024	Magdarius	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	masyarakat susah mendapatkan informasi penting	manganio, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	Saumanganya	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Usulan diterima
29	1595718	13-03-2024	Magdarius	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	susahnya masyarakat mendapatkan informasi penting	mabulaubuggei, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	Saumanganya	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Usulan diterima
30	1595739	13-03-2024	Magdarius	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	susahnya mendapatkan informasi	mapiang utara, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	Saumanganya	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Usulan diterima
31	1595753	13-03-2024	Magdarius	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	susah mendapatkan informasi	Pinairuk, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	Saumanganya	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Usulan diterima
32	1595924	13-03-2024	Magdarius	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	pusat informasi pengadaan wifi Pustu	mapiang, Pinairuk, Pujaring an, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	Saumanganya	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Usulan diterima

33	1595940	13-03-2024	Magdarius	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	pengadaan jaringan wifi di sekolah SDN 4 UNIT	SDN Mapinang utara, Beubuk, Guluk, Manganjo, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Pagai Utara	Saumanganya	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	Usulan diterima
34	1597368	14-03-2024	Farlin Boddot	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Belum ada Tower besar di Desa Sagulubbeg	Desa Sagulubbeg, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Usulan diterima
35	1597370	14-03-2024	Farlin Boddot	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Belum ada Tower Besar di Dusun Tepuk	Dusun Tepuk, Desa Sagulubbeg, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Usulan diterima
36	1597373	14-03-2024	Farlin Boddot	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Belum ada Wifi di SDN 08 Sagulubbeg, SDN 26 Sagulubbeg, SDN 27 Sagulubbeg, SDN 28 Sagulubbeg dan SMPN 02 Siberut Barat Daya di Sagulubbeg	Lingkungan Desa Sagulubbeg, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Usulan diterima
37	1597376	14-03-2024	Farlin Boddot	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Belum ada Pembangunan Wifi di Poskesdes Dusun Pupaliat, Poskesdes Dusun Lumago, Poskesdes Dusun Masi, dan Poskesdes Dusun Buga	Dusun Pupaliat, Dusun Lumago, Dusun Masi dan Dusun Buga, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Usulan diterima
38	1597379	14-03-2024	Farlin Boddot	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Belum ada Tower besar (4G) di Dusun Mapinang	Dusun Mapinang, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Usulan diterima
39	1597382	14-03-2024	Farlin Boddot	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Penambahan Kapasitas Jaringan di Dusun Pupaliat	Dusun Pupaliat, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat Daya	Sagulubbeg	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Perangkat Daerah	Usulan diterima
40	1621366	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan Tower Bisnis 1 Unit	Dusun Simalibegg-Muntei, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk di fasilitasi ke BAKTI
41	1621395	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pengadaan wifi SMP N 3 Siberut Barat	SMP N 3 Siberut Barat Dusun Simalibegg-Muntei, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan di survey
42	1621408	21-03-2024	May Sarly, SH	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pengadaan Wifi Khusus Poskesdes Matuptuman yang bisa menunjang Nakes dalam pembuatan Laporan dan Komunikasi Sektoral.	Dusun Maboak, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Sipora Utara	Betumonga	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk difasilitasi ke BAKTI
43	1621590	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pengadaan wifi SDN 27 Dusun Salkoat	SDN 27 Dusun Salkoat, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk difasilitasi ke BAKTI
44	1621607	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pengadaan wifi sekolah di SDN 17 Simatalu Dusun Bojo	SDN 17 Simatalu Dusun Bojo, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk difasilitasi ke BAKTI
45	1621629	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan Tower Mini Dusun Bojo	Dusun Bojo, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk difasilitasi ke BAKTI
46	1621633	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan Tower Mini	Dusun Salkoat, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk di survey dan di fasilitasi ke BAKTI
47	1621669	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pengadaan wifi di SDN 25 Simatalu Dusun Suruan	SDN 25 Simatalu Dusun Suruan, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk disurvey dan difasilitasi ke BAKTI
48	1621701	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pengadaan wifi di SDN 05 Simatalu	SDN 05 Simatalu, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk di survey dan difasilitasi ke BAKTI
49	1621706	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan Tower Mini Dusun Paipajet Hulu	Paipajet Hulu, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk di survey dan di fasilitasi ke BAKTI
50	1621727	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan Tower Mini Dusun Kulumen	Dusun Kulumen, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk di survey dan di fasilitasi ke BAKTI

51	1621763	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan Tower Mini Dusun Masaba	Dusun Masaba, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk di survey dan di faasilitasi ke BAKTI
52	1621766	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pengadaan wifi di SDN 28 Simatalu Dusun Masaba	SDN 28 Simatalu Dusun Masaba, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk di survey dan di faasilitasi ke BAKTI
53	1621833	21-03-2024	Stefanus Sribere, SP	Kelurahan / Desa	Pembangunan tower BTS, peningkatan kualitas jaringan, pengadaan wifi	Pembangunan Tower Mini Dusun Limau	Dusun Limau, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simatalu	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Verifikasi Kecamatan	direkomendasikan untuk di survey dan di faasilitasi ke BAKTI